

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi massa yang dibentuk oleh para Kyai pemimpin tradisional, hal ini upaya untuk merespon kebangkitan Nasional. Di kalangan beberapa pesantren sebelum terbentuknya Nahdatul Ulama para kyai sudah membentuk organisasi pergerakan, seperti *Nahdatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air), pada 1916, *Taswirul Afkar* atau yang dikenal dengan *Nahdatul Fikri* (kebangkitan Pemikiran), yang kemudian mendirikan *Nahdatul Tujjar*, (pergerakan kaum saudagar).¹

Nahdatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya² pada 16 Rajab 1344 H/ 31 Januari 1926 M.³ Peristiwa sejarah berkumpulnya para ulama terkemuka,⁴ di Kampung Kertopaten Surabaya dengan bermaksud membahas dan menunjuk delegasi Komite Hijaz⁵ utusan yang hendak dikirim untuk menyampaikan pesan kepada Raja Abdul

¹ Ehwanudin, *Tokoh Proklamator Nahdatul Ulama : Studi Historis berdirinya Jamiyah Nahdatul Ulama*, (Lampung: Jurnal Fikri, Vol 1, No.2 Desember 2016), 449.

² Basis masa Nahdlatul Ulama yang sangat besar di Indonesia terutama di daerah Surabaya, dan daerah yang berdekatan dengan Karesidenan Kediri dan Bojonegoro; selanjutnya di Kudus dan sekitarnya. Lihat: A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1994), 109.

³ ARSIP PBNU. Statuten Perkoempoelan Nahdlatuol 'Oelama' Mendapat *Rechtspersoon* pada 6 Februari 1930 No IX. Didirikan 1244 H dalam Tahun 1926 M.

⁴ Para Ulama terkemuka yang dimaksud adalah, ulama yang pada masa itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam skala daerah maupun nasional, yang hadir dalam pertemuan Kertopaten-Surabaya, tepatnya di rumah Kyai Abdul Wahab Hasbullah. Diantara para ulama itu adalah KH. Hasyim Asyari Tebuireng-Jombang, KH. Bisri Syansuri Denanyar-Jombang, KH. Asnawi Kudus, KH. Nawawi Pasuruan, KH. Ridwan Semarang, KH. Maksum Lasem, KH. Nahrawi Malang, H. Ngoro Munthaha (Menantu KH. Kholil) Bangkalan Madura, KH. Abdul Hamid Faqih Sedayu-Gresik, KH. Abdul Halim Leuwimunding-Cirebon, KH. Ridwan Abdullah, KH. Mas Alwi, KH. Abdullah Ubaid Surabaya, Syekh Ahmad Ghanaim Al-Misri asal Mesir, dan beberapa ulama lainnya yang tidak sempat tercatat namanya. Lihat: Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979), 609.

⁵ Komite Hijaz adalah panitia khusus yang dibentuk oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah atas restu KH. Hasyim As' yari. Susunannya terdiri dari : Ketua : H. Hassan Gipo, Wakil Ketua : H. Saleh Syamil, Sekretaris: Moh. Syadiq dibantu Abdul Halim. Sedang KH. Wahab Hasbullah sebagai Penasehat dibantu K.Mashyuri dan KH. Chalil Lasem. Tugas utama komite ini antara lain : merumuskan sikap para ulama pemegang Madzhab Ahlussunah Wal Jama'ah untuk disampaikan

Aziz Ibnu Saud penguasa baru Hijaz (Arab Saudi) yang mempelopori terbentuknya Nahdatul Ulama.

Tujuan utama Nahdatul Ulama dibentuk adalah agar berlakunya ajaran Islam yang menganut paham *Ahlussunah Wal Jamaah*⁶ dan menurut salah satu dari Madzhab empat (Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali). Organisasi ini lahir dari wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan (nasionalisme) pada awal abad ke-20. Jika dilihat dari wawasan keagamaan, kelahiran NU merupakan reaksi atau respon dari kalangan ulama terhadap adanya upaya pembaruan yang dilakukan oleh kalangan modernis Islam baik dalam skala Nasional (Indonesia) maupun Internasional.⁷ Arti penting lain pembentukan NU sebagai sebuah organisasi adalah berkaitan dengan wawasan kebangsaan (nasionalisme) yang selalu dijadikan sebagai salah satu dasar perjuangannya selama ini. wawasan kebangsaan (nasionalisme) yang dimiliki NU dapat dilihat pada setiap langkah dan kebijakan NU yang sejak dulu hingga sekarang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

kepada penguasa Hijaz. Disamping itu juga mempersiapkan pemberangkatan delegasi Hijaz serta menghubungi ulama Pesantren se-Jawa dan Madura. Lihat: Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab*, (Bandung: Baru, 1970), 12-15.

⁶ Makna *Ahlussunah Wal Jamaah* menurut NU tidak ubahnya seperti definisi yang dikemukakan oleh KH. Sirajudin Abbas bahwa *Ahlussunah* berarti penganut Sunnah nabi Muhammad SAW; *sedangkan Wal Jamaah* adalah penganut *I'tiqad* sebagaimana *I'tiqad* Jamaah sahabat-sahabat nabi Muhammad SAW. Menurut Istilah, Kaum *Ahlussunah Wal Jamaah* adalah kaum yang menganut *I'tiqad* seperti *I'tiqad* yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dasar gerakan keagamaan NU sudah jelas, yakni sebagai penganut sunnah Nabi Muhammad SAW dan pemegang teguh sunnah Sahabat Nabi. Lihat: Sirajudin Abbas, *I'tiqad Ahlussunah Wal Jamaah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2002), 16.

⁷ Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni Madzhab Wahabi di Arab Saudi, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun PraIslam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap *bid'ah*. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik di kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan KH. Ahmad Dahlan maupun Syarikat Islam (SI) di bawah pimpinan Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto. Sebaliknya kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Lihat : Abu Mujahid, *Sejarah NU "Ahlussunah Wal Jamaah di Indonesia*, (Bandung: Toobagus Publishing, 2013), 15.

Nahdatul Ulama memiliki karakteristik tersendiri dari organisasi lain. Salah satu diantara itu adalah otoritas dan kepemimpinan ulama.⁸ Dalam lingkungan NU, Ulama memiliki posisi yang sangat strategis, disamping karena pengaruh tradisi keagamaan yang dikembangkan, yakni paham *Ahlussunah Wal Jamaah* yang mengharuskan penghormatan dan otoritas ulama, juga pemilihan nama organisasi *Nahdatul Ulama* (Kebangkitan Ulama) menggambarkan posisi sentral ulama dalam NU.⁹

Beberapa faktor yang melatarbelakangi berdirinya organisasi Nahdatul Ulama adalah sebagai berikut :

1. Motif Agama ; Hendak menjiarkan agama Islam serta melatih hidoep jang selaras dengan toentoenanja.
2. Menumbuhkan nasionalisme : hendak melakoekan pekerdjaan kebaikan oemoem. Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe Fardloe ‘ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki perempoean, anak-anak, bersendjata atau tidak (bagi orang-orang jang berada dalam djarak lingkaran 94 KM, dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh.¹⁰
3. Semangat pendidikan: hendak memadjoekan pengetahoean dan kepandaian serta boedi pekerti jang baik kepada anggota-anggotanja.
4. Upaya mempertahankan paham *Ahlussunah Wal Jamaah*. Orang Islam jang soedah ‘akil baligh jang berhaloean salah satoenja madzhab empat (Sjafi’ie,

⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi tentang pandangan Hidup Kyai* , (Jakarta: LP3ES, 1983), 55.

⁹ A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 1995), 45.

¹⁰ ARSIP PBNU. Resoloesi Moektamar Nahdlatoeel Oelama ke-XVI jang diadakan di Poerwokerto moelai malam hari Rebo 23 hingga malam Sabtu 26 Rb. Oestani 1365 bertepatan dengan 26 hingga 29 Maret 1946.

Chanafi, Maliki dan Chambali) laki-laki atau perempuan, boleh diterima menjadi anggota menaerotoeran perkoempoelan.¹¹

Sebelum lahirnya organisasi-organisasi pergerakan Islam di Indonesia, jika melihat jaringan ulama sepanjang abad ke-19-20, munculnya figur-figur besar yang sangat penting dan amat kontributif pada dinamika intelektual dan sosial di Indonesia. Diantara mereka yang terpenting adalah figur-figur besar sejak dari Syekh Nawawi al-Bantani, Khalil Bangkalan, Ahmad Rifa'i Kali Salak, Mahfudz At-termasi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, M. Saleh Darat Al-Samarani, Hassan Mustafa Bandung, KH. Hasyim Asyari, Ahmad Dahlan, sampai kepada Syekh Yasin bin Isa al-Padani.¹² Dari jaringan ulama tersebut pada akhirnya banyak melahirkan beberapa tokoh ulama-ulama yang berjuang menentang kolonialisme Belanda dengan munculnya organisasi-organisasi Islam diantaranya Matlaul Anwar, Muhammadiyah, Persis, NU, Persatuan Umat Islam dan lain-lain.

Jaringan ulama tersebut bisa memberikan informasi bahwa adanya tradisi keilmuan yang seimbang antara wilayah Jawa bagian Barat (Sunda) dan Jawa (Non Sunda) dalam eksistensi NU di Jawa Barat mengapa kyai-kyai NU Jawa Barat menganggap bahwa kedudukannya tidak menganggap adanya ikatan emosional antara guru dan murid seperti yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur walaupun NU dilahirkan di daerah tersebut. Sehingga eksistensi NU di Jawa Barat sangat menarik diteliti walaupun kyai-kyai NU di Jawa Barat selalu menghadiri acara-acara kegiatan formal NU semisal kongres akan tetapi mereka menganggap

¹¹ Kyai Hadji Abdoelwahab Chasboellah, Toeroenan Permohonan oentoek disjahkan atas pendirian Perkoempoelan Agama, (Djakarta : Diatoerkan kehadapan Padoeka Kandjeng Toean Kepala Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Djawa Djakarta, disjahkan pada 10-9-2603 oleh GUNSEIKEN yang berarti tahun 1943 M. Lihat Pula : Tahun Jepang atau yang dikenal sebagai zaman kaisar adalah cara penghitungan tahun di Jepang berdasarkan tahun Kaisar Jimmu naik tahta pada 660 SM. Di Indonesia, tahun Jepang pernah digunakan pada masa pendudukan Jepang. Naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia bertanggal hari 17 bulan 8 tahun 05 (singkatan untuk tahun Jepang 2605) sama dengan 17 Agustus 1945. Lihat. <https://TahunJummuJepang.com>

¹² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 12.

kedudukannya sama dalam hal keilmuan mereka. Bahkan ulama-ulama kharismatik di Jawa Barat merupakan guru dari beberapa kyai-kyai NU yang mendirikan NU di Surabaya misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani¹³ yang merupakan salah satu ulama yang tersohor pada masanya yang melahirkan beberapa ulama-ulama berpengaruh di Nusantara.

Berkenaan dengan Eksistensi NU di wilayah Jawa Barat, ada beberapa peristiwa yang menarik untuk dikaji dalam Tesis ini. NU adalah sebuah gerakan kultural yang diinternalisasikan ke dalam struktural sebuah organisasi. Dengan istilah lain, adanya NU dalam bentuk organisasi (*jamiyah*) hanyalah sekedar penegasan formal dari sebuah mekanisme informal dalam wujud organisasi.¹⁴ Mekanisme seperti itu memungkinkan NU dapat menyebar dengan dua cara, melalui pola jaringan legal formal dan jaringan kultural. Hasilnya akan menjadi apa NU di Jawa Barat tergantung dari bagaimana formal dan kultural tersebut bekerja.

Menurut catatan C. Snouck Hurgronje (1889) dalam “*Mekka in the latter part of the 19th century : Daily life, customs and learning The Moslims of the East-Indian Archipelago*” memuat sejumlah informasi terkait ulama-ulama Sunda yang berada di Mekkah. Ia membedakan antara Sunda Priangan dengan Sunda Banten. Dari Banten, diantara nama ulama yang disebut Hurgronje adalah Syekh Nawawi, kedua adiknya, juga Syekh Abdul Karim Banten, Abu Bakar Djajadiningrat, seorang *menak* Sunda-Banten (anak bupati Pandeglang), yang bekerja di konsul Belanda di Jeddah. Mengatakan bahwa Djajadiningrat juga yang menjadi aktor dibalik suksesnya

¹³ Lahir di Tanara, Serang, Banten Jawa Barat (sekarang provinsi Banten) pada 1230 H – 1314 H atau 1815 – 1897 M. Ia merupakan ulama besar, penulis produktif, imam dan pendidik di Masjidil Haram Mekkah, yang mampu mengangkat citra ulama dan murid dari kalangan al-Jawi di hadapan ulama Timur Tengah. Ia mendapatkan gelar *Sayyidu ‘Ulama’I al-Hijaz* (Kampunnya ulama Hijaz). Diantara murid-muridnya adalah : KH. Hasyim Asyari dari Jombang (1871-1947), KH. Khalil dari Bangkalan (1836-1925), KH. Mahfudz at-Tarmisi dari Tremas (1842-1917), Lihat: H.M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2010), 654. Lihat juga: Nina Herlina Lubis dkk, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*, (Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia cabang Jawa Barat, 2011), 98.

¹⁴ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 2010), 67.

Hurgronje masuk ke Mekkah dan bertemu dengan beberapa ulama di kota suci itu salah satunya yang berasal dari Jawa Barat (Sunda). Hurgronje juga menyebut beberapa nama ulama asal Sunda-Priangan diantaranya adalah Muhammad Garut, Hassan Mustafa Garut. Ia juga menyinggung Raden Yusuf Purwakarta yang menjadi guru Syekh Nawawi Banten.¹⁵

Dari catatan Snouck Hurgronje tersebut, organisasi NU Jawa Barat sebagai wilayah Sunda dari kultur keilmuan dan intelektual tidak harus mengikuti arahan dan intruksi mengenai paham-paham *ahlussunah waljamaah* harus diterapkan secara *kaffah* kepada para anggotanya di berbagai cabang NU Jawa Barat akan tetapi sesuai dengan kultur Sunda-Nya Sendiri. Dalam hal ini dalam perkembangan cabang-cabang NU di Jawa Barat tidak terlalu cepat di banding dengan wilayah-wilayah lain khususnya di pulau Jawa. Bahkan jika terjadi pemilihan umum baik kepala daerah ataupun pemilihan presiden, calon yang diusung atau didukung oleh Nahdlatul Ulama akan selalu mengalami perolehan suara yang tidak signifikan jumlahnya di banding dengan di luar Jawa Barat (Sunda).¹⁶

Ketertarikan penulis kepada Eksistensi NU di Jawa Barat pada tahun 1931-1967 karena NU menyelenggarakan Congres pertama di Cirebon. Melalui congress tersebut organisasi NU mudah menyebar ke seluruh cabang-cabang NU di Jawa Barat khususnya di daerah Priangan yang sebelumnya sangat sulit untuk menyebarkan pengaruhnya ke daerah tersebut. Dengan terjadinya Congres NU ke-6 di Cirebon dan Congres ke-7 di Bandung tersebut membuka dan menarik minat masyarakat Islam Sunda khususnya daerah Priangan yang di sekitar Bandung untuk mengenal

¹⁵ C. Snouck Hurgronje, (translate), J.H. Monahan, *Mekka : In the Later Part of The 19th Century, Daily Life, Custom and Leaning the Moslims of The East-Indian Archipelago*, (London: Luzac & Co, 1931), 267.

¹⁶ Dalam realitanya, Nahdlatul Ulama di Jawa Barat tidak menjadi pilihan utama bagi masyarakat tradisional. Berdasarkan hasil pemilihan Umum DPRD di Jawa Barat pada pemilu 1955, NU hanya menempati posisi keempat dalam pemilu tersebut. Masyumi sebagai pemenang dengan perolehan suara 27,0 %, NU hanya meraup suara 9,8%. Bahkan NU masih kalah oleh PKI yang berada di urutan ketiga dengan suara 11,0 %. Lihat : ANRI. Hasil Pemilihan umum DPRD Kab/Prov Jawa Barat. NU 1948-1979.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yang sebagai alternatif pilihan dalam berorganisasi, selain di Jawa Barat banyak bermunculan organisasi-organisasi lain seperti Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, Persis, Mathlaul Anwar dan lain-lain .

Nahdlatul Ulama masuk ke Jawa Barat didorong oleh 3 faktor yaitu terciptanya hubungan kekerabatan antara para kyai, sanad¹⁷ keilmuan yang sama, dan hubungan intelektual di kalangan pesantren. Seorang santri yang akan mendirikan pesantren baru tidak akan mendapat restu dari gurunya apabila belum menimba ilmu pesantren di Jawa Timur. Biasanya, pesantren masyhur di Jawa Timur yang selalu menjadi tujuan akhir para santri dari Jawa Barat adalah pesantren Tremas (Pacitan), Pesantren Bangkalan (Madura), pesantren Lirboyo (Kediri), dan pesantren Tebuireng (Jombang).¹⁸

Persinggungan kelompok Islam tradisional di Jawa Barat dengan NU terjadi sejak organisasi tersebut berdiri. Dalam Congres Nahdlatu Oelama ke-3 tahun 1928¹⁹, diputuskan untuk menyebarkan organisasi ini ke berbagai daerah di pulau Jawa dan Madura yang akan dilaksanakan oleh *Lajnah Nashihin* (Komisi Propaganda). Untuk daerah Jawa Barat, upaya mendirikan cabang NU diberikan kepada KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, dan KH. Abdul Halim Majalengka. Ketiga kyai tersebut relatif dapat melaksanakan amanah Congres yang terlihat dari kedatangan utusan dari 13 cabang yang ada di Jawa Barat untuk

¹⁷ Sanad dalam tradisi warga Nahdliyin di Jawa Barat adalah silsilah keilmuan. Hal ini sangat berperan penting dalam keshahihan dan keberkahan ilmu yang didapat.

¹⁸ Nina Herlina Lubis, dkk, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*, (Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2011), 287.

¹⁹ Nama Oetoesan-oetoesan yang hadir dalam berita Nahdlatu Oelama dalam Congres nummer ketiga di Surabaya pada 12 Rabiul Tsani 1347 H atau 28 September 1928 yang berasal dari Jawa Barat diantaranya :KH. Abd Rachman, K. Toebaqris, H. Moehammad Arif (tf). E.E. Ismail (Pandeglang), K. M. Abbas, J. M. Moeslim (tf) Saijid Awoed Bansjar (Cheribon), KH. Dja'far Sodiq (tf) KH. Fadhil (Tasikmalaja), KH. Moehammad Zain, merangkap Tanfz (Indramajoe), KH. Abdullah (tf) R. M. Dachlan (Bandoeng), KH. Ali Bsiri merangkap (tf) (Serang), K. Faqih merangkap Tanfidziyah (Purwakarta). Lihat : Madjallah Berita Nahdlatu Oelama "*Congres Nummer ketiga*" 9 Rajab 1356 H atau 15 September 1937 M, (Soerabaja: Kantoer Hoofdbestuur N.O. Sasak Str. 66), 33.

menghadiri Congres ke-4 di Semarang tahun 1929. Selain itu, dalam Congres tersebut, KH. Dimiyati dari pesantren Sukamiskin Bandung menyatakan dukungannya kepada NU sehingga keberadaannya organisasi tersebut di Jawa Barat semakin menguat.

NU cabang Tasikmalaya merupakan salah satu cabang yang didirikan pada awal berdirinya NU bersama-sama dengan Ciamis dan Cirebon. Keberadaan NU cabang Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari peranan KH. M. Fadhil (Ciamis) yang antara tahun 1927-1928 menemui beberapa kyai Tasikmalaya. Hasilnya, pada 1928 para ulama berhasil mendirikan cabang NU Tasikmalaya di bawah kepemimpinan KH. M. Fadhil (Rois Syuriah) dan H. Dasuki (Ketua Tanfidziyah).²⁰ Meskipun demikian, sampai tahun 1930-an keberadaan NU di Tasikmalaya belum dikenal secara luas di kalangan umat Islam di Tasikmalaya.

Pada 1930, KH. Abdullah Ubaid (salah seorang anggota pengurus Besar NU), berceramah di Masjid Agung Tasikmalaya yang antara lain membahas aspek hukum dari menyuntik atau mengawetkan mayat. Ceramah itu mendapat respon positif sehingga beberapa orang kyai yang memiliki basis pesantren menggabungkan diri dengan NU Cabang Tasikmalaya, antara lain KH. O. Qolyubi dari pesantren Cibeureum, KH. Dahlan dari Pesantren Cisarulang, KH. Sobandi dari pesantren Cilenga, KH. Yahya dari Pesantren Gegernoong, KH. Ruhiat dari Pesantren Cipasung, dan KH. Zaenal Mustafa dari pesantren Sukamanah.²¹

Dengan bergabungnya para tokoh agama Islam ke dalam organisasi NU yang memiliki peran sangat besar Persebaran NU di Jawa Barat, memungkinkan NU masuk dengan cara legal formal, terutama menyangkut dengan legalitas pendirian cabang-cabang NU. Para Kyai dari wilayah Jawa Barat yang sudah terhubung secara

²⁰ H.A.E Bunyamin, *Lintasan Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya*, (Tasikmalaya: 1995), 4.

²¹ Nina Herlina Lubis, dkk, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*, (Bandung: Yayasan Sejarawan Masyarakat Indonesia Cabang Jawa Barat, 2011), 288.

kultural dengan para kyai pendiri NU memiliki kebiasaan untuk hadir pada kongres-kongres dan Mukhtar-Mukhtar NU. Hal ini berdampak pada dibentuknya atau dilegitimasinya cabang-cabang NU di tempat mana kyai tersebut itu berasal. Pada Kongres NU ke-5 di Pekalongan tahun 1930 NU telah memiliki 6 cabang di Jawa Barat.²² Kongres ke-6 di Cirebon tahun 1931, Kongres NU ke-7 di Bandung tahun 1932, Lima tahun kemudian, pada kongres NU ke-10 di Solo pada 1935 NU telah memiliki 9 cabang di Jawa Barat.²³ Pada kongres NU ke-15 di Surabaya tahun 1940 NU di Jawa Barat telah memiliki 11 cabang. Saat itu NU sudah memiliki sistem konsulat atau pengurus wilayah.²⁴

Tidak hanya itu, kongres NU yang beberapa kali dilaksanakan di Jawa Barat juga sangat berpengaruh bukan hanya pada perkembangan cabang-cabang NU di Jawa Barat tetapi juga eksistensi NU secara keseluruhan. Beberapa kebijakan yang menentukan arah NU ke depan lahir pada pelaksanaan kongres NU di Jawa Barat. Misalnya, Kongres NU ke-13 di Menes tahun 1938 dipandang sebagai kongres akbar yang sukses dilaksanakan pada masa Hindia Belanda. Kongres ini banyak menghasilkan keputusan penting terkait pembentukan lembaga-lembaga otonom (khusus) NU. Terkecuali untuk eksistensi NU di wilayah Jawa Barat, Kongres NU di Menes menjadi bagian integral dari pertumbuhan dan perkembangan NU melalui cara formal. Perhelatan akbar tersebut telah memberi gambaran yang konkrit sekaligus menggiring umat ke arah persatuan lembaga NU.²⁵

Dari sudut pandang lain, wilayah Jawa Barat dari konstelasi nasional memiliki “sumber daya” yang dapat menjadi media pendukung proses perkembangan NU melalui jaringan kultural. Persebaran NU di Jawa Barat dapat melalui keberadaan

²² Madjallah Berita Nahdlatol Oelama Congres Nummer Ke-5, Oetoesan Hahdlatol Oelama No. 5 Tahoen ke-2 Bulan April 1930), 73-75.

²³ Madjallah Al-Mawaidz. No. 16. Tahoen ke-3 tanggal 16 April 1935), 231.

²⁴ Madjallah Berita Nahdlatol Oelama daftar Pengoendjoeng konggres NO Jang ke-15 di Kota Soerabaja, 1940), 34.

²⁵ ARSIP PBNU. Verslag Congres Nahdlatol Oelama jang Ke-XIII Kota Menes Bantam 11/12 – 16/17 Juni 1938.

kyai beserta pesantren-pesantren tradisional yang banyak tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, baik pesantren berskala besar, menengah, maupun skala kecil. Mulai dari Jawa Barat bagian Timur sampai Jawa Bagian Barat misalnya dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Karawang, Subang, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Sukabumi, dan Bogor, masing masing terdapat setidaknya dua sampai tiga pesantren besar yang eksis di pimpin oleh kyai. Selanjutnya sedikit demi sedikit organisasi ini menyebar melalui hubungan antara kyai-santri di pesantren yang semakin eksis. Benih-benih pembentukan jaringan tradisional kyai NU Jawa Barat dimulai dari lembaga pendidikan Islam Pesantren. Anak-anak kyai yang diharapkan akan menggantikan ayah mereka, dikirim ke pesantren-pesantren yang dipimpin kawan karib, asisten spiritual atau keturunan mereka. Tidak jarang terjadi terutama pesantren yang mengkhususkan vak-vak tertentu, anak-anak kyai mengaji di pesantren yang sama tempat ayah mereka dulu pernah menuntut ilmu.²⁶ Dengan adanya kecenderungan pola kekeluargaan dan ikatan kyai tradisional NU di Jawa Barat (Sunda) yang sangat begitu kuat, maka para kyai-kyai tersebut memiliki ikatan emosional yang tinggi dalam mempertahankan jaringan tersebut.

Semua sumber daya yang sedemikian ada tersebut idealnya dapat menjadikan NU menjadi organisasi yang paling menarik di wilayah Jawa Barat. Akan tetapi, dalam tataran prakteknya kecenderungan pola ideal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Misalnya saja, berdasarkan Verslag Congres Nahdlatol 'Oelama jang ke 14 di kota Magelang pada 1939 NU di Jawa Barat hanya memiliki 8 Cabang saja.²⁷ Dan pada Mukhtamar ke 22 di Jakarta pada 1959 NU di Jawa Barat sudah memiliki 24 Cabang.²⁸ Berkaitan dengan hal ini perlu dikaji bagaimana interaksi NU dengan organisasi-organisasi keagamaan Islam lain di wilayah Jawa Barat.

²⁶ Hiroko Horikoshi, (Penj). Andi Muarly Sunrawa, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1973), 199.

²⁷ ARSIP PBNU. Verslag Congres Nahdlatol Oelama jang ke-14 di kota Magelang, 1/2 - 6/7 1939.

²⁸ ARSIP PBNU. Buku kenang-kenangan Mukhtamar ke XVII Partai Nahdlatul Ulama di Jakarta, 12 s/d 17 Dj.Tsani 1379 H / 13 s/d 18 Desember 1959 M.

Mengingat Jawa Barat adalah tempat dimana berbagai organisasi Islam tumbuh subur. Sehingga sangat memungkinkan jika wilayah ini menjadi arena pergulatan pemikiran di antara organisasi-organisasi yang ada. NU sebagai organisasi “pendatang” di wilayah Jawa Barat harus berhadapan dengan organisasi Islam yang dilahirkan di wilayah Jawa Barat. Begitu pun NU sebagai organisasi Islam tradisional akan mendapati persaingan bukan hanya dengan kalangan modernis terutama Persis tetapi juga dengan organisasi lain sesama penganut Islam tradisional.

Dari berbagai kausal faktor diatas, hipotesa sementara bahwa harus ada penelitian yang bisa menjelaskan bagaimana Eksistensi NU di wilayah Jawa Barat dari masa ke masa. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian NU di wilayah Jawa Barat sebagai objek dan tema kajian penelitian dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk Tesis.

Unsur spasial yang akan dikaji dalam Tesis ini adalah wilayah Jawa Barat dalam pengertian *Province West Java* pada masa kolonial Belanda yang dibentuk pada 1 Januari 1926, kemudian sejak 19 Agustus 1945 dibentuk Provinsi Jawa Barat oleh pemerintah Republik Indonesia. Adapun wilayah awal dari provinsi *West Java* ini meliputi Karesidenan Cirebon, Karesidenan Priangan, Karesidenan Bogor, Karesidenan Batavia, dan Karesidenan Banten. Sesuai pembentukan provinsi yang dituangkan dalam *Staatsblad* (lembaran negara) tahun 1952 Nomor 378 tanggal 14 Agustus. Sementara itu, unsur temporal yang akan dikaji dalam tesis ini adalah tahun 1932-1967, dimana NU yang sudah menjadi *Jamiyah* (organisasi) berubah statusnya menjadi Partai Politik dan mendukung penuh demokrasi Pancasila yang berlandaskan UUD 1945.²⁹ Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke XXIV di Bandung 1967 sangat penting

²⁹ Resolusi Mukhtamar N.U. ke-24 yang berlangsung di Bandung Djawa Barat dari tanggal 4-9 Djuli 1967; yang dihadiri lengkap oleh Tjabang-Tjabang-nja dari seluruh daerah. Setelah mendengar dan mempeladjar laporan P.B.N.U setjara keseluruhan, dan setelah mendengar Pandangan umum para utusan. Memutuskan menerima dengan baik kebidjaksanaan P.B.N.U setjara keseluruhan yang dilakukan dalam periode Mukhtamar ke-25 sampai ke-24. Lihat : Dokumen salinan Resolusi Mukhtamar N.U. Ke-24 tanggal 4 – 9 Juli 1967 yang ditetapkan di Bandung: 7 Djuli 1967, Pimpinan rapat/sidang H.A. Muiz Ali.

arti dan pengaruhnya. Karena Mukhtamar ke-XXIV ini, selain dilangsungkan pada detik-detik seluruh bangsa Indonesia mengalami tahap rehabilitasi dan stabilisasi politik, ekonomi, dan sosial, setelah bangsa dan tanah air kita mengalami keguncangan yang dahsyat yang melanda semua aspek hidup dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.³⁰ Alasan pengambilan tahun ini adalah NU manjadi partai politik yang akan mempengaruhi perkembangan NU dan bangsa Indonesia pada masa-masa mendatang sehingga pada akhirnya dengan dilaksanakannya Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984 dan Pengaruh Komunis di Indonesia bisa dihancurkan.³¹

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya dikategorisasikan sebagai sejarah organisasi. Dalam signifikansinya mengenai sejarah organisasi NU di wilayah Jawa Barat ini menurut penulis memiliki tingkat informasi dan kepentingan yang sangat tinggi untuk dilakukan penelitian (*resereach*). *Pertama*, diharapkan dengan penelitian ini menjadi bahan informasi dan bagi masyarakat Jawa Barat khususnya para Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat beserta cabang-cabangnya Se-Jawa Barat untuk bisa tertib admisnistrasi dalam mengelola segala sumber

³⁰ Pada waktu diselenggaranya Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-24 di Bandung, NU merupakan organisasi yang berjuang mempertahankan ideologi Pancasila agar bisa menjadi ideologi negara sesuai dengan hasil musyawarah dengan para pendiri bangsa pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk pada 1945. Salah satunya bisa dibuktikan dengan beberapa keputusan NU dalam muktamar tersebut diantaranya : dibidang politik, NU tengah menghadapi meningkatnya Gerpol. Gestapu/PKI dan sisa-sisa Orde Lama, disamping menghadapi kegiatan-kegiatan subversip warga negara Asing China yang didalangi, dipimpin dan dikoordinir oleh pemerintah Republik Rakyat China untuk menggagalkan tercapainya tahap rehabilitasi dan stabilisasi di segala bidang, terutama bidang ekonomi dan keamanan. Sedang dibidang luar negeri, dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang merupakan tantangan langsung bagi negara-negara yang baru berkembang. Lihat: ARSIP PBNU. Buku Petunjuk Mu'tamar ke-XXIV Partai Nahdlatul Ulama tanggal 4 s/d 9 Juli 1967 di Bandung.

³¹ Pengurus wilayah Nahdlatul 'Ulama Jawa Barat, sebagai realisasi dari program kerja PW. NU Jawa Barat hasil hasil konferensi ke XI di Tasikmalaya dan Penjabaran hasil Mukhtamar NU ke 27 di Situbondo, yaitu menyelenggarakan latihan kepemimpinan dan rapat pleno Syuriah yang membahas kompilasi hukum Islam dalam rangka menyambut peringatan Harlah NU ke 62 yang dipusatkan di pondok pesantren Margasari Buah Batu Bandung. Lihat : ARSIP PBNU. 1 (Satu) bendel Harapan dan Mohon Petunjuk PB.NU Nomor 119/PW-JB/VIII/1986. Bandung 2 Dzulhijjah 1406 H atau 8 Agustus 1986 M.

informasi yang dirasakan menurut penulis masih sangat minim jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi Islam lainnya di Jawa Barat.³²

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap peranan para kyai/ajengan dan santri NU yang berasal dari Jawa Barat. Di internal NU sendiri popularitas para kyai dari wilayah Jawa Barat (Sunda) tidak sedominan kyai-kyai dari wilayah Jawa Timur dan wilayah Jawa Tengah. Setidaknya tulisan-tulisan mengenai NU masih didominasi oleh perspektif penokohan kyai yang berasal dari wilayah Jawa Timur dan wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, mengenai kapan dan pastinya organisasi NU pertama kali muncul masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Benar ada sejumlah catatan yang bisa dijadikan bahan rujukan terkait dengan kepentingan pengumpulan seputar informasi perkembangan NU tersebut. Akan tetapi sekali lagi, hal itu hanya membahas dan mengungkap tokoh-tokoh NU yang berada pada level nasional dan hampir semuanya masih membahas wilayah Jawa Timur dan wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, harus ada penelitian tandingan yang mampu menjelaskan (*eksplanation*) dengan bukti-bukti dalam bentuk tulisan mengenai sejauh mana peranan ulama-ulama Sunda dalam dinamika persebaran dan perkembangan NU di wilayah Jawa Barat secara komprehensif.

Ketiga. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi media yang digunakan oleh segenap jamaah warga Nahdhiyin Kultural di wilayah Jawa Barat dalam rangka lebih mengenai dari segi sejarahnya (struktur NU). Keempat, menjadi memberikan

³² Dari hasil observasi penulis, organisasi Nahdlatul Ulama khususnya di Jawa Barat dalam hal pengarsipan atau pendokumentasian sejarah, masih sangat minim bahkan sangat sulit dicari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan NU Jawa Barat. Sehingga sangat menyulitkan dalam proses pengumpulan sumber (*Heuristik*) dibandingkan dengan organisasi yang lainnya seperti Muhammadiyah dan Persis yang sudah lebih rapih dan menyimpan dokumen-dokumen sejarah organisasi mereka. Hal ini juga dibenarkan oleh Greg Fealy bahwa publikasinya sangat sedikit, seringkali berkualitas rendah dan dengan distribusi terbatas, para pimpinan NU juga jarang bergaul dengan kalangan cendekiawan dan politisi elit di Jakarta yang sering dikunjungi para peneliti Barat. Lihat : Greg Fealy, (Penj). Farid Wajidi, *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2003), 9-10.

informasi kepada para peneliti baik dari kalangan akademisi dan praktisi bahwa meneliti NU yang bersifat kedaerahan itu sangat mudah dan menarik asalkan memiliki kemampuan yang kompeten di bidangnya. Oleh karena itu, topik pun harus topik sejarah, dapat diteliti sejarahnya. Topik yang “*workable*” dapat dikerjakan dalam waktu yang tersedia.³³ Selebihnya, unsur-unsur lain seperti *manageable* dan *obtainable* topik mendukung penulis untuk merekonstruksi Sejarah NU di wilayah Jawa Barat dengan Judul “Eksistensi Nahdlatul Ulama di Jawa Barat (1931-1967)”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian karya ilmiah ini adalah bagaimana Eksistensi Nahdlatul Ulama di Jawa Barat (1931-1967). Kemudian untuk menjawab rumusan masalah tersebut dibatasi dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Proses Berdirinya Nahdlatul Ulama di Jawa Barat ?
- 2) Bagaimana Eksistensi NU Jawa Barat yang dicerminkan oleh cabang-cabangnya ?
- 3) Bagaimana Eksistensi NU Pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pembatasan masalah yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Menjelaskan Proses Berdirinya Nahdlatul Ulama di Jawa Barat.
- 2) Menjelaskan Eksistensi Cabang-Cabang Nahdlatul Ulama di Jawa Barat.
- 3) Menjelaskan Eksistensi NU Jawa Barat pada masa transisi dari Orde lama ke Orde Baru.

³³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 70.

1.4. Kajian Pustaka

Walaupun berbagai kajian tentang Nahdatul Ulama telah banyak yang dilakukan, namun upaya penelitian tentang penelitian yang mengkaji sejarah perkembangan Nahdatul Ulama di Jawa Barat masih sangat sedikit bahkan sangat sulit untuk ditemukan, pada gilirannya berbagai penjelasan yang diketengahkan pun belum memiliki nuansa yang komprehensif untuk tingkat wilayah. Namun itu semua tidak menyurutkan penulis untuk melakukan *critical review* terhadap beberapa judul dengan contoh kasus daerah yang berbeda-beda. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tesis Agung Purnama dari program pascasarjana Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran Bandung yang membahas “*Jamiyah Nahdatul Ulama di Jawa Barat pada 1926-1945*”. Dalam tulisannya hanya menjelaskan masa pembentukan awal NU pada tahun 1926 di Surabaya yang hipotesa sementara dari Tesis tersebut belum ditemukan jawaban yang pasti mengenai berdirinya Nahdatul Ulama di Jawa Barat (tatar Sunda) menjelang kemerdekaan. Namun, Pada tulisan tersebut ditemukan berbagai informasi mengenai sumber data informan, referensi dan lain-lain yang sangat membantu dalam penulisan tesis ini. Berbagai kajian terdahulu itu di antaranya Jamiyah Nahdatul Ulama di Jawa Barat pada 1926-1945 yang ditulis oleh Agung Purnama. Tesis tersebut merupakan satu-satunya yang membahas sejarah muncul, dan berkembangnya Nahdatul Ulama di Jawa Barat yang dalam pembahasannya menjelaskan bahwa para kyai yang berasal dari wilayah Jawa Barat (Sunda) memiliki andil yang cukup besar dalam terbentuknya Nahdatul Ulama di Surabaya pada 31 Januari 1926. Meliputi fase rintisan Nahdatul Ulama di Jawa Barat melalui jaringan Ulama 1926-1934, perkembangan Cabang-Cabang Nahdatul Ulama di Jawa Barat 1934-1942, dinamika kongres NU yang diselenggarakan di Jawa Barat pada 1931, 1932, 1933, 1937, dan kondisi NU di Jawa Barat pada masa pendudukan Jepang 1942-1945. Berkaitan dengan penelitian tesis ini telah memberikan informasi awal mengenai

beberapa tokoh-tokoh kyai, sumber-sumber, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sejarah Nahdatul Ulama di Jawa Barat. Perbedaannya dengan Tesis ini, ruang dan waktu yang berbeda disertai pembahasan juga berbeda.

2. Buku yang ditulis oleh Nina Herlina Lubis dan kawan-kawan dengan judul "*Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*". Sesuai dengan judulnya, tulisan tersebut memfokuskan perhatiannya terhadap perkembangan sejarah masuknya Islam di Jawa Barat mulai dari Penyebaran Islam di Jawa Barat, Perkembangan Pesantren-pesantren, Riwayat Para Kyai terkemuka dan perkembangan Tarekat di Tatar Sunda, Naskah-Naskah Islam tinggalan arkeologis, dan organisasi politik, organisasi massa, lembaga-lembaga, pendidikan, dan Tawasuf Modern. Khusus dalam tema tentang kyai dalam buku yang membahas mengenai jejak-jejak pesantren di Tatar Sunda dari masa permulaan masuknya Islam hingga kolonial, perkembangan pesantren di Jawa Barat setelah proklamasi kemerdekaan, dan pesantren sebagai ujung tombak pemeliharaan khazanah Intelektual Islam Klasik. Bisa diperoleh konklusi bahwa dengan lahir dan berkembangnya pesantren-pesantren tersebut akan melahirkan jaringan ulama dan santri yang berusaha mempertahankan tradisi-tradisi pesantren masa lalu hingga sekarang yang menjadi salah satu basis organisasi Nahdatul Ulama Jawa Barat konsisten hingga sekarang. Secara metodologis dari aspek spasial buku ini tidak sejarah menjelaskan Nahdatul Ulama di Jawa Barat secara langsung, tetapi dalam isinya banyak sekali informasi mengenai riwayat-riwayat kyai Jawa Barat yang terkemuka yang bisa membantu memberikan informasi mengenai tokoh-tokoh kyai tersebut dan sumber informan yang bisa dilacak dari buku tersebut.
3. Buku lain yang dijadikan tinjauan Pustaka adalah buku "*Nahdatul Ulama Jawa Barat : Sejarah dan Perkembangannya*" yang ditulis oleh Rosihon Anwar dan kawan-kawan. Buku ini merupakan proyek dari program unggulan pengurus wilayah Lajnah *Ta'lif wa Nasyr* (PWLNTNU) Jawa Barat periode 2007-2011. Buku ini merupakan penulisan sejarah lokal tematik yang membahas Nahdatul Ulama

Jawa Barat dimulai dengan Sejarah Jawa Barat, Sejarah dan berkembangnya Islam di Jawa Barat, Pertumbuhan dan perkembangan NU di Jawa Barat, Profil tokoh-tokoh NU dan pondok pesantren di Jawa Barat, dan NU Jawa Barat menatap masa depan. Yang menjadi fokus dari buku tersebut adalah beberapa pesantren dan kyai yang massa awal dan bertahan hingga sekarang di Jawa Barat terafiliasi dengan organisasi NU dengan beberapa sampel dari pesantren Buntet Cirebon, KH. Zaenal Mustafa dari Sukamanah Tasikmalaya, dan Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Bahkan pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani yang hidup pada 1815-1897 M dimasukkan ke dalam profil tokoh-tokoh NU yang pada masanya NU belum lahir bahkan belum bisa mengalami atau memperjuangkan NU secara langsung. Bahkan menurut Wakil Sekteratis Lakspedam PWNU Jawa Barat Periode 2016-2021 yakni H. Ahmad Dasuki banyak sekali kesalahan-kesalahan informasi dalam buku tersebut terutama mengenai penulisan tahun. Jika dibaca secara menyeluruh buku ini tidak menjelaskan secara kronologis bagaimana perkembangan NU di Jawa Barat.

4. Buku yang berjudul *“Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdatul Ulama di Indonesia”* yang ditulis oleh Choirul Anam. Dalam buku tersebut berusaha memahami potret diri NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang menganut paham *ahlussunah wal jamaah*, dengan cara menelusuri, memahami sistem nilai, dan sejarah pertumbuhan dan perkembangannya serta melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh NU dengan beberapa pembahasan menyangkut : (1). Potret NU secara umum melalui pola kebangkitannya, motivasi berdirinya, profil pendiriannya, dan sejarah pertumbuhannya. Dengan demikian akan segera diketahui siapa sebenarnya NU dan sebesar apa pula pengaruh serta peranannya dalam perkembangan Islam dan pembangunan Indonesia; (2). Memahami sistem nilai yang berlaku di lingkungan NU. Sistem nilai yang dimaksud adalah prinsip-prinsip ajaran yang secara dogmatis telah membentuk watak NU berbeda dengan watak organisasi keagamaan lainnya; (3). Perubahan sosok NU yang berubah

- bentuk dari jamiyah menjadi partai politik kemudian berubah lagi menjadi jamiyah; (4). Pergumulan NU dalam politik praktis menyebabkan NU mengambil madharat ketimbang manfaatnya sehingga berbagai konflik intern antara Tanfidziyah dan Syuriah, yang sekaligus menandai tata nilai di kalangan NU; (5). Pilar-pilar kekuatan NU yang meliputi basis massa, basis ulama politisi, serta tradisi ulama dan nasab di kalangan warga nahdiyyin. Dari buku tersebut yang merupakan buku yang komprehensif mengkaji dan menjelaskan NU secara Nasional informasi-informasi dari tulisan tersebut sangat membantu terutama mengenai informasi awal atau gambaran umum mulai munculnya NU di Indonesia hingga menjelang Mukhtamar ke-27 pada 1984 di Situbondo, Jawa Timur.
5. Buku yang berjudul "*Kyai dan Perubahan Sosial*" yang di tulis oleh Hiroko Horikoshi. Dalam tulisannya membahas mengenai mekanisme cara-cara para Ulama Islam tradisional melestarikan kelembagaan dan kekuasaan mereka. Peran kreatif mereka dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat setempat, strategi empiris dan sosiologis yang mereka tempuh serta struktur budaya lokal unsur-unsur penting yang menentukan keberadaan mereka. Buku tersebut merupakan penelitian di Wanaraja, Garut dari bulan September 1972-Agustus 1973.
 6. Buku yang ditulis oleh Ahmad Zahro dengan judul "*Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama : Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*". Buku ini memaparkan dan menguji metode, rujukan (kitab-kitab kuning) dan validitas (hasil) pengambilan keputusan hukum (*istimbat*) di NU yang dilakukan oleh Lajnah Bahtsul Masa'il NU selama kurun waktu 1926 (Congres ke-I) sampai 1999 (Muktamar ke-XXX). Memuat informasi komprehensif tentang Bahtsul Masail NU, mulai dari kitab-kitab yang digunakan dan madzhab mana yang paling dominan. Kritik dari buku ini tidak diungkapkannya konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan Bahtsul Masa'il. Seolah-olah, keputusan yang diambil oleh Lajnah Bahtsul Masa'il hanya persoalan hukum saja.

7. Buku yang ditulis oleh Greg Fealy yang berjudul "*Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967*". Fokus buku ini adalah struktur kekuasaan dalam tubuh NU dan pola-pola kepemimpinannya. Ulama berada di pusat kehidupan keagamaan dan politik Partai : basis kekuasaannya, sifat jaringan patronasinya, dan hubungan mereka dengan politisi awam NU, hasil-hasil yang dicapai NU dalam politik, baik untuk kepentingan pendukungnya maupun negara pada umumnya.
8. Buku yang berjudul "*Sejarah Nahdlatul Ulama : Ahlussunah Waljamaah di Indonesia*" yang ditulis oleh Abu Mujahid. Buku ini membahas dinamika keorganisasian Nahdlatul Ulama seiring dengan pergantian pucuk kepemimpinan yang dimulai oleh Pendiri NU yaitu KH. Hasyim As'wari yang dilanjutkan oleh anaknya KH. Wahid Hasyim yang mengalami kecelakaan di daerah Cimahi. Selanjutnya NU dipimpin oleh KH. Abdurahman Wahid dan terakhir pimpinan NU dipegang oleh KH. Said Aqil Siraj. Walaupun dari judul membahas tentang NU di Indonesia, tetapi dari pembahasannya membahas mengenai Tarekat Khalwatiah dan Samaniah yang berafiliasi dengan NU, perdebatan antara kubu reformis dan tradisional yang mengawali perselisihan antara dua kubu tersebut, bahkan Sejarah Muhammadiyah di Indonesia mulai cabang-cabang Muhammadiyah tahun 1921-1923, 1916-1920, Muhammadiyah diluar Jawa tahun 1933 dimasukkan dalam tulisan ini. walaupun dari substansinya tidak membahas NU secara menyeluruh tetapi ada bagian yang menjelaskan (*to explanation*) beberapa informasi mengenai sosiologi ringkas pesantren, Tarekat, Pesantren, dan Kitab kuning, dan susunan pengurus pertama NU.

1.5. Landasan Teori

Setiap kajian sejarah selalu memiliki ruang lingkup istimewa dari segi waktu dan tempat, dan keduanya merupakan faktor yang bisa membatasi setiap fenomena

sejarah tertentu sebagai satu kesatuan yang kompleks.³⁴ Penelitian ini Pada dasarnya menyatakan pentingnya suatu kajian proses historis yang menjelaskan sejarah perkembangan salah satu organisasi/ *jamiyah* yang ada di wilayah Jawa Barat. Kajian historis ini muncul bagaimana Eksistensi Nahdatul Ulama sebagai organisasi di Jawa Barat pada 1931-1967 bisa memberikan pengaruh dan dinamika yang sangat besar terhadap konstelasi politik nasional. Oleh karenanya, dibutuhkan penjelasan mengenai *grand teory* untuk menganalisis suatu peristiwa atau fenomena sebagai pisau analisisnya.

Menurut Kutha Ratna, Kerangka Teori adalah teori-teori yang dianggap paling relevan untuk menganalisis objek. Sebagai alat teori itulah yang dianggap paling memadai, paling tepat, baik dalam kaitannya dengan hakikat objek maupun kebaruannya.³⁵ Kajian historis yang menggambarkan Eksistensi NU di Jawa Barat 1931-1967 yang relevan dengan pembabakan tahun sesuai penulis yang dianggap relevan harus bersifat sinkronis bukan lagi diakronis sehingga akan ditemukan teori mana yang sesuai dengan *setting* peristiwa yang terjadi pada massanya khususnya di wilayah Jawa Barat pada 1931-1967 yang melatarbelakangi kausalitas dari peristiwa tersebut bisa dilihat dari sosial, teologis, politik, hal itu semua tergantung dari pendekatan (*approach*) yang diambil. Penggambaran kita mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan ialah dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya.³⁶

Untuk menuliskan Eksistensi NU di Jawa Barat 1931-1967, harus diperlukan teori tentang sistem sosial yang mengemukakan mengenai seorang aktor yang

³⁴ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), 130.

³⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 281.

³⁶ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), 4.

berpengaruh dalam proses terjadinya perubahan dalam masyarakat dari Talcott Parsons³⁷ yaitu teori Fungsionalisme Struktural.

Dalam mendefinisikan teorinya, Parsons menyatakan ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem harus memiliki empat fungsi ini sebagai berikut:

1. *Adaptation* (adaptasi) : sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan) : sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (integrasi) : suatu sistem harus mengatur antar hubungan, bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan fungsi penting lainnya.
4. *Latency* (pemeliharaan pola) : sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kalangan anti tradisi di Jawa Barat, menyebabkan adaptasi (*adaptation*) dari para aktor (kyai/ ajengan) dalam merespon perubahan-perubahan yang dilakukan oleh golongan anti tradisional, sehingga para kyai yang tergabung dalam visi dan misi yang sama berusaha sekuat mempertahankan (*goal attainment*) tradisi-tradisi keagamaan dengan tujuan bersama. Sehingga akan terjadinya proses integrasi (*integration*) yang menjadikan kekuatan mereka semakin kuat dan terjadilah pemeliharaan pola-pola (*latency*) yang membentuk hirarki kepemimpinan dibawah kepemimpinan kyai.

³⁷ Talcott Parsons pada 1902 di Colorado Spring, Colorado, Amerika Serikat. Dalam pemikirannya, Gagasan Parsons sangat dipengaruhi oleh Weber dan akhirnya ia menulis Disertasinya di Heidelberg, yang sebagian menjelaskan karya Weber. Ia meninggal pada 8 Mei 1989 di Munchen, German. Lihat: George Ritzer, (penj). Triwibowo BS, *Teori Sosiologi modern edisi ketujuh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 122.

Dalam empat fungsi tersebut, Parsons berpendapat yang menjadi faktor utama dalam proses integrasi (integrasi) adalah sistem tindakan pada aktor dan sistem sosial. Menurutnya, persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem sosial adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Ia berpendapat bahwa proses sosialisasi yang berhasil norma dan nilai itu diinternalisasikan, artinya norma itu menjadi bagian dari kesadaran aktor. Akibatnya, dalam mengejar kepentingan mereka sendiri, aktor sebenarnya mengabdikan kepada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan. Sedangkan sistem sosial, Parsons mengemukakan bahwa sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor individu yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan mengoptimalkan “tindakan” yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam *term* sistem simbol yang secara bersama yang terstruktur secara kultural. Parsons mengatakan bahwa kombinasi pola orientasi nilai yang diperoleh (oleh aktor) dalam sosialisasi pada tingkat yang sangat penting, harus menjadi fungsi dari struktur peran fundamental dan nilai dominan sistem sosial.³⁸

Dalam melihat gejala-gejala eksistensi NU di Jawa Barat 1931-1967, kemunculan NU di Jawa Barat adalah tindakan dari beberapa aktor di dalam masyarakat yang berusaha mempertahankan tradisi-tradisi Islam di Jawa Barat dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kelompok antri tradisional. Karena untuk mempertahankannya, dibutuhkan sistem nilai yang mewadahi para aktor untuk membuat sistem nilai dalam berkelompok agar kedudukan para kyai sebagai aktor utama dalam tatanan masyarakat khususnya di pedesaan di Jawa Barat tetap eksis.

Teori ini berangkat dari kesadaran akan kenyataan aktor utama dalam mempertahankan tradisi-tradisi Islam yang sudah diwariskan oleh para Walisanga adalah kyai/ajengan yang memiliki peran (*role*) yang utama melalui jaringan

³⁸ George Ritzer, (penj). Triwibowo BS, *Teori Sosiologi modern edisi ketujuh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 120-121.

pesantrennya yang terjalin dalam komunitas sehingga menjadi integritas kolektif. Parsons menegaskan bahwa integritas kelompok itu harus diwujudkan dalam sebuah sistem sosial yang dinami dan bersatu.

Dalam konteks kehidupan beragama, manusia seringkali membutuhkan orang lain ketika hendak menyalurkan hasrat religinya sekedar untuk memahami satu ayat dalam kitab suci seseorang membutuhkan orang lain sebagai guru. Kesamaan ideologi, faham dan kultur keagamaan dengan orang lain juga akan mendorong seseorang mengidentikan dirinya dengan *jamaah* yang lebih besar yang akan membentuk sebuah komunitas. Dari *komunitas* tersebut, kesamaan ideologi, faham, dan kultur keagamaan yang telah terbentuk akan diinternalisasi kepada sebuah lembaga formal. Memang pada hakikatnya institusi agama bukan lembaga organisasi, karena institusi agama adalah syariat agama itu sendiri beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi norma dan sistem nilai adakalanya melahirkan lembaga-lembaga yang mewadahi keyakinan manusia serta penyeragaman perilaku.³⁹

Dalam proses institusionalisasi tersebut ke dalam enam tahap, yaitu :

1. Proses saling belajar dalam berbudaya melalui interaksi dengan masyarakat sesama organisasi.
2. Proses saling berbagi budaya (*share culture*) di antara anggota organisasi.
3. Proses saling mewariskan budaya dari generasi ke generasi berikutnya.
4. Proses simbolisasi perilaku yang dipandang representatif bagi integrasi kultural organisatoris.
5. Proses pembentukan dan pengintegrasian perilaku sosial.
6. Proses adaptasi dari semua perilaku masyarakat institusional.

Dalam tatanan sosial, aspek lingkungan yang mengalami adanya perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan berusaha menghilangkan tradisi-tradisi

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama: Perilaku Institusional dalam Beragama Anggota Persis dan NU*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 27.

agama yang sudah mapan tersebut, maka kyai/ ajengan adalah tokoh utama (aktor) dalam merespon perubahan-perubahan tersebut dengan menggabungkan diri mereka dalam organisasi masyarakat yang satu paham dan satu tujuan dengan kyai tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Melihat pokok permasalahan di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode *history*⁴⁰ deskriptif-analitis, terutama dengan menggunakan dokumen-dokumen penting yang berkaitan erat dengan persoalan-persoalan yang sedang dibahas.⁴¹ Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang mencakup heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

1.6.1. Heuristik & Kritik

Heuristik, mengumpulkan fakta-fakta atau informasi yang menunjang dan sesuai dengan tema penelitian. Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan. Peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas, yakni dengan mencermati kembali keterangan-keterangan atau data historis yang telah terkumpul tentang Eksistensi NU di Jawa Barat pada 1932-1967.

⁴⁰ G.J. Renier melihat bahwa sejarah (*history*) lebih tepat didefinisikan sebagai “cerita tentang perbuatan-perbuatan dan pencapaian-pencapaian manusia yang hidup dalam kelompok-kelompok”. Dan tugas sejarawan menurutnya adalah harus bisa menggambarkan suatu *story* sebagai suatu yang pantas untuk diceritakan, di mana ia sendiri bisa memahami peristiwa-peristiwa (fenomena) yang ia ceritakan, serta harus menerangkannya dengan memuaskan. Lihat: G.J. Renier, (Penj). Muin Anwar, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 29-32.

⁴¹ Secara khusus, cara-cara penggunaan dokumen terutama yang berkaitan dengan penelitian sejarah dan ilmu-ilmu sosial, telah di bahas secara komprehensif oleh Sartono Kartodirdjo, *Metode penggunaan bahan documenter, dalam metode-metode Penelitian masyarakat*, ed. Koentjaraningrat, (Jakarta: Gramedia, 1997), 44-69.

Setelah melakukan tahap Heuristik (pengumpulan sumber-sumber), maka dilakukan tahapan verifikasi yaitu kritik atas sumber-sumber sejarah untuk menguji keabsahan sumber. Ini sering disebut sebagai proses Kritik Intern, yaitu kritik yang ditujukan untuk menguji kredibilitas terhadap kesaksian yang diberikan sumber data (isi). Dalam Kritik Intern untuk menguji tentang kesahihan sumber lisan dan sumber tertulis dengan melakukan komparasi dengan sumber lain.⁴² Menurut urutan penyampaiannya, Sumber itu dapat dibagi kedalam sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah disebut primer bila disaksikan oleh saksi mata misalnya catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan. Adapun dalam ilmu sejarah, Sumber sekunder ialah yang disampaikan bukan oleh saksi mata. Sejarahwan wajib menuliskan dari mana data itu diperoleh, baik primer maupun sekunder.⁴³

Berikut ini beberapa sumber Primer dan Sekunder yang berhasil diperoleh:

A. Arsip.

1. Buku kenang-kenangan Mukhtar ke XVII Partai Nahdlatul Ulama di Jakarta, 12 s/d 17 Dj. Tsani 1379 H / 13 s/d 18 Desember 1959 M.
2. Buku Petunjuk Mu'tamar ke-XXIV Partai Nahdlatul Ulama tanggal 4 s/d 9 Djuli 1967 di Bandung.
3. Catatan C. Snouck Hurgronje, (translate), J.H. Monahan, Mekka : *In the Later Part of The 19th Century, Daily Life, Custom and Leaning the Moslims of The East-Indian Archipelago*, (London : Luzac & Co, 1931).
4. Resoloesi Moektamar Nahdlatul Ulama ke-XVI jang diadakan di POERWOKERTO Moelai malam hari Rebo 23 hingga malam Sabtoe 26 Rb Oetsani 1365 bertepatan 26 hingga Maret 1946.
5. Statuten Perkoempoelan Nahdlatul Ulama mendapat *Rechtspersoon* pada 6 Februari 1930 No. IX didirikan 1344 H dalam Tahoen 1926 M..

⁴² Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: LP3ES, 1986), 63.

⁴³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 75.

6. Toeroenan Permohonan Oentoek Disjahkan Atas Pendirian Perkoempoelan Agama jang diatoerkan kehadapan Padoeka Kandjeng Toean Kepala Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Djawa Djakarta pada tanggal 14 boelan 6 tahoen 2603 oleh GUNSEIKEN. Verslag Congres NO jang ke 14 di kota Magelang, Jawa Tengah 6-7 Juli 1939.
7. Verslag Congres NO yang ke XIII di Kota Menes, Banten 12 Juni 1938.
8. Verslag Congres Nahdatoel ‘Oelama jang ke 14 di kota Magelang, 6-7 Juli 1939.
9. 1 (Satu) bendel Harapan dan Mohon Petunjuk PB.NU Nomor 119/PW-JB/VIII/1986. Bandung 2 Dzulhijjah 1406 H atau 8 Agustus 1986 M.

B. Majalah dan Surat Kabar

1. Dokumen salinan Resolusi Mukthamar N.U. Ke-24 jang berlangsung di Bandung Djawa Barat dari tanggal 4-9 Djuli 1967. Diperoleh dari Perpustakaan Pengurus Besar NU.
2. Madjallah Al-Mawaidz. NO. 16. Tahoen ke-3 tanggal 16 April 1935.
3. Madjallah Berita Nahdlattoel Oelama “Congres Nummer ketiga” 9 Rajab 1356 H atau 15 September 1937 M, (Soerabaja : Kantoer Hoofdbestuur N.O. Sasak Str. 66).
4. Madjallah Berita Nahdlattoel Oelama Daftar Pengoendjoeng Konggres NO Jang ke-15 di Soerabaja 1940.
5. Madjallah Berita Nahdlattoel Oelama Congres Nummer Ke-5, Oetoesan Hahdlattoel Oelama No. 5 Tahoen ke-2 Bulan April 1930).

C. Jurnal Ilmiah

1. Pemikiran Kyai Nahdatul Ulama dengan Kaum Modernis Islam di Jawa Barat (1930-1937). Diperoleh dari Jurnal Patanjala Vol. 9 No.2 Juni 2017.
2. Tokoh Proklamator Nahdatul Ulama : Studi Historis berdirinya Jamiyah Nahdatul Ulama). Diperoleh dari Jurnal Fikri, Vol 1, No.2 Desember 2016.
3. Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955, Diperoleh dari Jurnal Basis Edisi NO. 3-4 Maret 2002.

4. Sujati, Budi. 2018. Konsepsi Pemikiran Filsafat Sejarah dan Sejarah menurut Ibnu Khaldun, (Cirebon : Jurnal Tamadun, Vol. 6, No. 2 Juli)

D. Sumber Lisan

1. KH. Sayuti lahir pada 1941 sampai sekarang (78 Tahun) beliau adalah mantan Ketua PCNU Kab. Indramayu tahun 1972-1977 dan mantan ketua PMII Cirebon 1964-1968. Beliau adalah saksi hidup dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Kab. Indramayu, wawancara tanggal 15 Desember 2018 Pukul 09:00 WIB.
2. KH. Abdul Aziz Haidar, (umur 70 Tahun) anak kedua dari KH. Haidar Dimiyati Pengasuh Pondok Pesantren Sukamiskin Bandung. Beliau adalah salah satu informan yang mendapat informasi sejarah lisan dari ayahnya yaitu KH. Haidar Dimiyati yang pada tahun 1948 menjadi ketua PCNU Kab. Bandung sampai pemilu 1955. Wawancara pada 19 Januari 2019 pukul 10:00 WIB.
3. KH. Ade Furqon, (umur 79 Tahun), ketua Rois Syuriah PCNU Kab. Sumedang 2014-2019. Beliau sebagai informan yang mengetahui Sejarah NU di Kab. Sumedang terkait pada tahun 1952-1955 ketika Partai Nahdlatul Ulama mempersiapkan diri dalam pemilihan umum 1955. Wawancara pada 19 Januari 2019 pukul 11:30 WIB.
4. KH. Hasan Bisri Syafei lahir 12 Desember 1947 (umur 72), Mantan Sekretaris PCNU Karawang tahun 1980-an, Ketua PCNU Karawang selama 2 Periode. Wawancara dilakukan pada 19 Januari 2019 pukul 11:00 WIB.
5. KH. Ach. Sarkosi lahir pada 1943 (Umur 76 Tahun), pengasuh Pondok Pesantren Mansyaul Huda yang terletak di Ds. Heuleut Kec. Kadipaten Kab. Majalengka. Dia memiliki Kartu Partai Nahdlatul Ulama Tahun 1961. Wawancara pada 29 April 2019 Pukul 17:30 WIB.
6. H. Dedi Mulyadi, ketua (umur 52 Tahun), PCNU Kab. Majalengka periode 2018-2023. Menurutnya salah satu pelaku hidup dari perkembangan NU di

Majalengka adalah Mamah Sarkosi yang memiliki Kartu Tanda Partai Nahdaltul Ulama. Wawancara pada 29 April 2019 Pukul 15:00 WIB.

7. Hj. E. Ratu Siti Hassanah, S.Ag, (Umur 71 Tahun), Istri dari Alm. KH. Hafidz Utsman mantan ketua PWNU Jawa Barat periode 1980-1990 dan ketua MUI Jawa Barat periode 2000-2014. Dalam kehidupan sehari-harinya menemani sang suami, beliau menjelaskan bahwa salah satu kiprah KH. Hafidz Utsman adalah dia ulama NU yang bisa diterima oleh semua golongan termasuk Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain-lain. Dia juga sebagai *founding Father* (bapak pendiri) UIN Sunan Gunung Djati Bandung bersama KH. Anwar Musadad. Wawancara pada 21 Januari 2019 pukul 17:00 WIB.

1.6.2. Interpretasi

Tahap Ketiga dari metode penulisan sejarah adalah interpretasi, mengulas dan membaca kembali fakta-fakta tersebut dengan berbagai pendekatan, baik melalui pendekatan historis,⁴⁴ maupun hermeneutika,⁴⁵ Tidak ada interpretasi yang bersifat final, sehingga setiap generasi berhak mengerangkan interpretasinya sendiri.⁴⁶ Ada lima jenis interpretasi yaitu interpretasi verbal yaitu sebagai berikut : (1). Interpretasi verbal, berkaitan dengan beberapa faktor yaitu Bahasa, perbendaharaan kata (*vocabulary*), tata bahasa, konteks, dan terjemahan; (2). Interpretasi teknis,

⁴⁴ Secara sempit Pendekatan *historis* adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah, dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau *historis* adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Tujuan pendekatan *historis* adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Seringkali penelitian yang demikian itu berkaitan dengan hipotesis-hipotesis tertentu. Lihat: Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 105.

⁴⁵ *Hermeneutika* berasal dari kata *Hermeneus* (Yunani) yang berarti penerjemahan. Maka melalui pendekatan ini seluruh fakta yang berupa teks itu bisa dibaca dengan baik. Jika ada jurang pemisah antara kenyataan fakta dengan kenyataan-kenyataan sekarang ini, maka kita harus bisa menjembatani dan menjelaskannya sesuai dengan masing-masing titik pangkal yang berbeda. Lihat : F. R. Ankersmit, (Penj). Dick Hartoko, *Refleksi Tentang Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1987), 153-154.

⁴⁶ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 107.

didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu tujuan penyusunan dokumen dan bentuk tulisan persisnya; (3). Interpretasi logis, yaitu interpretasi yang didasarkan atas cara berpikir logis; (4). Interpretasi psikologis, yaitu interpretasi tentang dokumen yang merupakan usaha untuk membacanya melalui kacamata pembuat dokumen untuk memperoleh titik pandangnya; (5). Interpretasi faktual, membiarkan fakta berbicara sendiri tanpa membuat interpretasi macam-macam sehingga bisa dikatakan mengatasi lainnya.⁴⁷ Dalam tahapan interpretasi bukti-bukti (*evidence*) sejarah harus disusun menjadi suatu peristiwa yang berkesinambungan dengan suatu peristiwa. Interpretasi bisa saja bersifat subjektivitas karena dalam langkah ini terkadang masuk pemikiran-pemikiran penulis atas suatu bukti sejarah. Cara yang dilakukan untuk menghindari subjektifitas adalah dengan menggunakan pendekatan tertentu yang bersifat ilmiah atau menggunakan konsep atau teori dalam menginterpretasikan sumber yang ditemukannya. Dengan cara seperti ini, diharapkan interpretasi sejarah akan bersifat objektif. Oleh karenanya, interpretasi merupakan langkah yang harus dilakukan oleh sejarawan agar tulisannya tidak memihak kepada siapapun dalam arti harus bersifat netral terhadap fakta-fakta yang ada. Peneliti harus mampu mengambil jarak dengan sumber agar tidak menimbulkan bias terhadap penulisannya.

1.6.3. Historiografi

Historiografi adalah melukiskan kembali agar menjadi susunan laporan penelitian yang bersifat konstruktif dan konseptual, dengan konfigurasi yang unik sehingga keseragamannya mudah dipahami. Penulisan sejarah tidak hanya merupakan pengumpulan fakta-fakta serta urutan-urutannya, tetapi semua itu di susun menurut pola-pola yang mendasarinya serta kerangka yang mencakupnya sebagai suatu kesatuan yang utuh.⁴⁸ Penjelasan sejarah dalam penelitian ini bersifat kronologis/diakronis dan sistematis sehingga menghasilkan sejarah sebagai kisah

⁴⁷ J.S.J. Gilbert Garaghan, *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1957), 321-337.

⁴⁸ Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia : Suatu Alternatif*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), 31.

yang bersifat ilmiah.⁴⁹ Dalam Tahapan ini salah satu tahap akhir untuk menyajikan semua fakta ke dalam bentuk sistematika Penulisan.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran struktur pada penelitian ini, sekaligus dapat diketahui arah penulisan Tesis ini sistematika penulisan merupakan petunjuk awal. Secara garis besar tulisan ini terdiri atas lima (5) bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- 1.4. Kajian Pustaka
- 1.5. Landasan Teori
- 1.6. Metode Penelitian
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II BERDIRINYA NAHDLATUL ULAMA DI JAWA BARAT

- 2.1. Latar Belakang dan Tujuan Berdirinya Nahdlatul Ulama di Jawa Barat
- 2.2. Proses Pendirian Nahdlatul Ulama di Jawa Barat
- 2.3. Organisasi Nahdlatul Ulama di Jawa Barat
 - 2.3.1. Kepemimpinan Dalam Islam & Dinamika Sosial
 - 2.3.2. Kedudukan Nahdlatul Ulama dalam organisasi Pergerakan Sosial

BAB III PERKEMBANGAN NAHDLATUL ULAMA DI JAWA BARAT

- 3.1. Perkembangan Organisasi dan Anggota

⁴⁹ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 11.

- 3.2. Cabang Nahdlatul Ulama Jawa Barat
- 3.3. Kiprah Nahdlatul Ulama Jawa Barat
 - 3.3.1. Bidang Politik
 - 3.3.2. Bidang Sosial Keagamaan
 - 3.3.3. Bidang Budaya

BAB IV NAHDLATUL ULAMA PADA MASA ORDE BARU

- 4.1. Nahdlatul Ulama menjadi Partai Politik
- 4.2. Langkah Nahdlatul Ulama pasca meletusnya G 30S PKI 1965
- 4.3. Respon NU terhadap pemerintah Orde Baru

BAB V. PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan

